

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2016, dunia pendidikan khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali memperkuat dan mendukung pemerintah dalam usaha membangun ekonomi nasional. Adanya perbaikan kurikulum dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK. Usaha tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK (Anim, 2017). Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peran penting mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam berbagai sektor ekonomi. Berlakunya Instruksi Presiden tersebut tidak hanya merancang siswa lulusan SMK menjadi tenaga terampil di dalam negeri, tetapi mampu pula bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pendidikan SMK memiliki tujuan mempersiapkan siswa mencapai kompetensi keahliannya seoptimal mungkin, selain itu siswa lulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan bidang keahliannya. Secara umum, pendidikan kejuruan tidak hanya terfokus mempersiapkan siswa menjadi calon tenaga kerja, namun siswa juga diharapkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda

dengan pendidikan SMK, siswa SMA tidak dipersiapkan untuk terampil dalam bidang keahlian khusus, sehingga siswa lulusan SMA dituntut untuk melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi agar mampu mendapatkan keahlian yang lebih mendalam.

Harapan pemerintah dan masyarakat terhadap lulusan SMK sampai dengan Februari 2017 belum mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik (2017), survei angkatan kerja nasional menunjukkan pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 sampai 2017, SMK mendapat peringkat pengangguran terbuka tertinggi ke dua setelah SMA.

Tabel. 1.1
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2016-2017

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2016		2017
		Februari	Agustus	Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	94.293	59.346	92.331
2	Tidak/belum tamat SD	557.418	384.069	546.897
3	SD	1.218.954	1.035.731	1.292.234
4	SLTP	1.313.815	1.294.483	1.281.240
5	SLTA Umum/SMU	1.546.699	1.950.626	1.552.894
6	SLTA Kejuruan/SMK	1.348.327	1.520.549	1.383.022
7	Akademi/Diploma	249.362	219.736	249.705
8	Universitas	695.304	567.235	606.939
	Total	7.024.172	7.031.775	7.005.262

Sumber : BPS (2017). Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 – 2017: Juni 2017, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran terbuka yang diartikan angkatan kerja tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan di Indonesia terbanyak ke dua adalah lulusan SMK, yang notabene adalah lulusan yang dianggap memiliki potensi untuk dapat langsung bekerja dibanding lulusan SMA atau sekolah sederajat lainnya. Dalam hal ini siswa lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil level menengah dianggap memiliki potensi mendukung pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Adapun Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN 2015 –2035 (2015) mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh dan menjadikan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Tersedianya sumber daya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah yang memadai dengan keterampilan yang tepat memiliki potensi yang besar membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan. Ini juga makin dipertegas oleh rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan populasi industri skala menengah dan besar sekitar 9000 usaha hingga tahun 2019. Maka dari itu Pemerintah mempersiapkan sektor pendidikan khususnya Pendidikan Kejuruan untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia.

Berbagai tantangan seperti tingginya angka lulusan SMK dan semakin terbukanya persaingan pasar bebas ASEAN akan menjadi dua tantangan terbesar bagi lulusan SMK di masa yang akan datang (Jefriando, 2016) pentingnya SMK mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kondisi tersebut menggambarkan bahwa penting bagi siswa lulusan SMK untuk memiliki tanggung jawab yang baik sebagai individu agar mampu bersaing, maupun melaksanakan pilihan karirnya sebagai tenaga kerja tingkat menengah, maupun pilihan karirnya untuk bekerja di perusahaan swasta/pemerintahan, berwiraswasta, kuliah, mengikuti kursus, atau memilih untuk menikah.

Adapun kaitannya dengan tuntutan dunia kerja (dunia usaha/industri) bagi tamatan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan penetapan Standar Kompetensi Nasional (SKN) lulusan SMK telah mewakili berbagai karakteristik kompetensi teknis bekerja yang dibutuhkan (Supriadi, 2002). Standar kompetensi tamatan SMK juga dirancang tidak hanya pada tuntutan kemampuan teknis berkerja yang tercantum dalam Standar Kompetensi Nasional (SKN), tetapi mengandung 3 komponen kompetensi yakni kompetensi normatif, adaptif dan produktif. Salah satu komponennya, yakni kompetensi normatif itu sendiri berisikan bahan-bahan pembelajaran untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa tanggung jawab baik secara pribadi,

sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Siswa SMK memiliki beban tanggung jawab yang lebih dibanding siswa pendidikan menengah sederajatnya. Diketahui dalam bidang pendidikan kejuruan untuk mengembangkan potensi ilmu pengetahuan pada masing-masing siswa maka sekolah (SMK) mempunyai jadwal khusus selama kurang lebih 3 bulan untuk menjalankan praktek di industri maupun di instansi yang memiliki ikaitan dengan bidang studi. Kegiatan praktek tersebut diberi nama Praktek Kerja Industri (PraKerIn). Praktek Kerja Industri merupakan perpaduan kegiatan sekolah dengan kegiatan belajar melalui bekerja langsung di dunia kerja baik swasta, maupun pemerintah.

Salah satu tujuan pelaksanaan PraKerIn ialah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dengan mengembangkan sikap profesional. Sikap profesional yang dimaksud adalah sikap siswa dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan keahliannya. Maka dari itu, tanggung jawab menjadi sangat diperlukan khususnya bagi siswa SMK, karena siswa akan menghadapi tuntutan sikap tanggung jawab dalam lingkungan Praktek Kerja Industri serta sebagai persiapan memasuki dunia kerja yang nyata.

Kondisi perkembangan zaman yang semakin global, individu dituntut untuk mampu berkembang dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat. Pada realitanya dalam proses pendidikan, banyak dijumpai permasalahan yang dialami oleh siswa seperti di lingkungan sosial (teman sebaya, orangtua dsb), media sosial yang tidak mendukung nilai moral baik, serta kurangnya pengembangan potensi seoptimal mungkin di sekolah. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi tugas dari semua pihak yang terlibat dalam usaha pendidikan termasuk guru Bimbingan Konseling. Sejalan dengan peranan guru BK dalam memberikan pelayanan bimbingan yaitu bertujuan meningkatkan potensi pribadi siswa. Komitmen penguatan karakter juga didukung serta dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2014 melalui salah satu butir Nawacita Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk konsep dan pedoman Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Effendy, 2016). Dijelaskan bahwa pelaksana guru Bimbingan dan Konseling berperan dan memiliki tanggung jawab mengembangkan perilaku jangka panjang yang menyangkut lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

Pada pemerintahan sebelumnya, sejak tahun 2010 ketika pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Kementrian

Pendidikan Nasional dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter membuat panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa (PPKB) yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan rasa cinta, serta bela terhadap negara. Teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional (Ramly, 2011) yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab.

Upaya mewujudkan peningkatan pendidikan karakter juga telah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yakni “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan karakter di lingkungan sekolah ini, juga dapat diintegrasikan pada pembelajaran di setiap mata pelajaran termasuk bimbingan dan konseling. Integrasi tersebut antara

lain, layanan dasar berupa bimbingan klasikal menggunakan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBK) dengan tujuan karakter baik siswa, layanan responsif berupa konseling individu dan kelompok, dan layanan perencanaan individual dan peminatan yang masing-masing diintegrasikan karakter dalam aspek pengembangan perilaku belajar, karier, pribadi, dan sosial.

Pendidikan kejuruan dikembangkan berdasar pada tuntutan dunia usaha dan dunia industri yang berkembang di masyarakat. Sebagai realisasi dalam pemenuhan tuntutan tersebut, maka diperlukan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga pengajaran di sekolah dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan dunia kerja sesungguhnya. Mustari (Aisyah, Nusantoro, & Kurniawan, 2014) menyatakan pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang teratur menurut sistem dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik yang bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hariyono (2016) menjelaskan bahwa dalam dunia kerja para pekerja dituntut memiliki karakteristik tanggung jawab, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Maka dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki karakter tanggung jawab, diharapkan berkembang dan mampu memaksimalkan potensi dirinya.

Menurut Hariyono (2016) tanggung jawab ialah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Penanaman karakter tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh siswa, menurut Lickona (2012) dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu tugas sehingga siswa dapat belajar bertanggungjawab melaksanakan pekerjaannya. Pembelajaran tanggung jawab ini sangat penting ditanamkan sebagai bekal awal siswa mampu melakukan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada pada dirinya baik hari ini, besok dan kedepan.

Dari hasil penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merancang penelitian dengan tujuan dapat meningkatkan tanggung jawab siswa khususnya untuk siswa menengah kejuruan. Untuk meningkatkan tanggung jawab siswa, peneliti akan menggunakan model pengajaran *Project Based Learning*. Badar (2014) menjelaskan *Project Based Learning* memiliki potensi besar yang menarik dan bermakna bagi peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Paul Suparno (Badar, 2014) menjelaskan *Project Based Learning* merupakan pembelajaran dimana peserta didik dalam kelompok diminta membuat atau melakukan suatu proyek bersama, dan mempresentasikan hasil proyek tersebut. *Project Based Learning* merupakan pendekatan pembelajaran yang akan melatih siswa mendapatkan pengalaman belajar bertanggung jawab untuk

mendapatkan dan mengelola informasi yang siswa cari, serta bertanggungjawab menyelesaikan proyek yang dibuat.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan yang bertempat di SMKN 5 Jakarta. Studi pendahuluan berupa wawancara guru Bimbingan dan Konseling, wawancara kepala jurusan Audio Video, serta pemberian angket tanggung jawab kepada siswa. Rekomendasi guru BK di SMKN 5 Jakarta, maka peneliti menetapkan kelas 12 Jurusan Audio Video sebagai sampel penelitian. Kelas 12 Jurusan Audio Video terdiri dari 3 kelas dengan jumlah 74 siswa. Hasil wawancara guru BK, maka diketahui beberapa kasus yang mengindikasikan terdapat siswa masih memiliki tanggung jawab yang rendah. Peneliti mengidentifikasi kasus dan mengelompokkannya berdasarkan 6 aspek tanggung jawab sebagai berikut : 1) contoh kasus Aspek hasil kerja yang bermutu, masih terdapat siswa yang mengerjakan tugas dengan tidak teliti, karena tidak memperlajari dengan sungguh-sungguh materi mengenai beragam komponen, sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan berulang dan menghasilkan kualitas benda elektronika yang tidak baik. 2) Aspek kesediaan menanggung resiko, dalam praktikum di bengkel Audio Video masih terdapat siswa yang kurang memiliki kesadaran dalam berhati-hati merawat atau berhati-hati dalam penggunaan alat prakteknya. Hal tersebut menggambarkan siswa kurang memiliki kesadaran mengenai

dampak negatif dari penyalahgunaan alat praktek yang dapat membahayakan dirinya. 3) Aspek pengikatan diri pada tugas, contoh kasus yang pernah terjadi ialah, terdapat siswa yang tidak memenuhi daftar nilai praktek, adapun nilai-nilai praktek tersebut terdiri dari sub-kompetensi yang secara bertahap perlu siswa kuasai dan terselesaikan, namun siswa belum mampu mengerjakan tugasnya sampai selesai. Tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu. 4) Aspek memiliki prinsip hidup, perilaku siswa yang yang tidak memberikan makna dalam hidupnya, seperti ada saja siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru di kelas. 5) Aspek kemandirian, kurangnya aspek kedirian yang menggambarkan siswa memiliki tanggung jawab yang rendah ialah ketika siswa tidak menyadari akan kewajibannya baik sebagai siswa SMK maupun sebagai calon tenaga kerja, contoh kasus siswa ketika diwajibkan untuk mengerjakan tugas individu tanpa bergantung kepada teman, siswa tersebut seringkali terlihat mencontek hasil pekerjaan teman. Kemudian contoh kasus yang terjadi pada 6) Aspek keterikatan sosial adalah, ketika siswa dalam pembagian tugas kelompok, terdapat siswa yang tidak maksimal atau tidak menyelesaikan tugas yang telah diberikan, maka dalam hal ini siswa tersebut dikatakan tidak memiliki aspek keterikatan sosial dalam tanggung jawab karena tindakannya mengganggu dan menghambat pekerjaan dalam kelompoknya.

Untuk menetapkan dan memperkuat target subjek penelitian, maka peneliti menyebarkan angket tanggung jawab dengan 50 pernyataan dengan tabulasi penskoran 1-4. Adapun klasifikasi kategori skor adalah jika hasil skor kurang dari 87,5 diartikan "Sangat Rendah", jika hasil skor kurang dari 112,5 dan lebih dari 87,5 maka diartikan "Rendah", apabila hasil skor kurang dari 137,5 dan lebih dari 112,5 maka diartikan "Sedang", dan jika hasil skor kurang dari 162,5 dan lebih dari 137,5 maka diartikan "Tinggi", serta apabila hasil skor lebih dari 162,5 dikategorikan "Sangat Tinggi". Hasil analisis dari 3 kelas tersebut, maka diketahui rata-rata skor terendah diperoleh kelas XII AV 2 dengan skor 127,12 dengan kategori "Sedang". Selanjutnya rata-rata terendah kedua ialah kelas XII AV 3 dengan skor 134,08 dengan kategori "Sedang"; kemudian kelas XII AV 1 dengan skor 138,4 dengan kategori "Sedang". Berdasarkan data tersebut, peneliti menetapkan dan memilih subjek kelas XII AV 2 sebagai kelompok eksperimen bimbingan klasikal, akibat dari kecenderungan rata-rata siswa tersebut memiliki skor rata-rata terendah yakni 127,12 dari 3 kelas yang telah diukur. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen berupa "Pengaruh Bimbingan Klasikal dengan Model *Project Based Learning* untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa Kelas XII AV 2 di SMKN 5 Jakarta"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tanggung jawab siswa kelas XII AV 2 di SMKN 5 Jakarta sebelum mendapatkan bimbingan klasikal dengan model *Project Based Learning* ?
2. Bagaimana gambaran tanggung jawab siswa kelas XII AV 2 di SMKN 5 Jakarta setelah mendapatkan bimbingan klasikal dengan model *Project Based Learning* ?
3. Apakah bimbingan klasikal dengan model *Project Based Learning* efektif untuk meningkatkan tanggung jawab siswa ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka perlu adanya pembatasan masalah. Ruang lingkup rumusan masalah ini dibatasi hanya pada aspek pemberian bimbingan klasikal menggunakan *Project Based Learning* guna meningkatkan tanggung jawab siswa kelas XII AV 2 di SMKN 5 Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Pengaruh Bimbingan Klasikal dengan Model *Project Based Learning* dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa Kelas XII AV 2 di SMKN 5 Jakarta”

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi guru Bimbingan dan Konseling, dapat menjadikan hasil penelitian sebagai referensi variasi model dalam pelaksanaan layanan Bimbingan Klasikal.
2. Bagi program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dapat menjadikan hasil penelitian sebagai referensi untuk memberikan pelatihan kepada guru BK di sekolah mengenai pengembangan teknik pada layanan Bimbingan Klasikal dalam rangka memaksimalkan pendidikan karakter di sekolah.
3. Bagi siswa, membantu siswa meningkatkan tanggung jawab yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Dengan memiliki tanggung jawab, siswa diharapkan dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya.